

## KERANGKA OPERASIONAL DAN ANALISIS MAKRO EKONOMI KEBIJAKAN MONETER

Fitri Wulandari Faradita<sup>1</sup>, Lidya Yuli Ambarwati<sup>2</sup>, Moch. Sandy Augusta<sup>3</sup>

*Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember<sup>1</sup>  
Jl.Mataram No. 1 Mangli, Kec. Kaliwates Kab. Jember*

*Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember<sup>2</sup>  
Jl.Mataram No. 1 Mangli, Kec. Kaliwates Kab. Jember*

*Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember<sup>3</sup>  
Jl.Mataram No. 1 Mangli, Kec. Kaliwates Kab. Jember*

[fw1266355@gmail.com](mailto:fw1266355@gmail.com)<sup>1</sup>

[lidyaambarwati72@gmail.com](mailto:lidyaambarwati72@gmail.com)<sup>2</sup>

[sandyaugusta575@gmail.com](mailto:sandyaugusta575@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*In monetary policy, the concept of monetary policy operational framework is used to explain how the central bank or monetary authority manages and controls economic activity using monetary policy instruments. The operational framework consists of three main parts: instruments, operational objectives, and intermediate objectives. Monetary policy instruments include various techniques used by the central bank to regulate the money supply and interest rates, including reserve requirements, open market operations, and political discounting.*

*This research uses a descriptive qualitative research design, One of the characteristics of this design is that this research prefers to use words or pictures rather than numbers to show facts. This research uses secondary data methods that detail the object of research in great detail and also data collected by others before. Surveys, observations, experiments, questionnaires, personal interviews, etc.*

*The results show that to maintain the stability of the monetary and financial system, monetary regulation combines macroprudential and monetary measures. Monetary policy uses a combination of tools to achieve monetary and financial system stability together, including quantity and price approaches.*

**Keywords :** *Monetary policy, operational framework, macroeconomics*

### ABSTRAK

Dalam kebijakan moneter, konsep kerangka operasional kebijakan moneter digunakan untuk menjelaskan bagaimana bank sentral atau otoritas moneter mengelola dan mengendalikan aktivitas ekonomi dengan menggunakan instrumen kebijakan moneter. Kerangka operasional terdiri dari tiga bagian utama: instrumen, tujuan operasional, dan tujuan antara. Instrumen kebijakan moneter mencakup berbagai teknik yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga, termasuk persyaratan cadangan, operasi pasar terbuka, dan diskon politik.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif, Salah satu ciri khas desain ini adalah bahwa penelitian ini lebih suka menggunakan kata-kata atau gambar daripada angka untuk menunjukkan fakta. Penelitian ini menggunakan metode data sekunder yang merinci objek penelitian

dengan sangat rinci dan juga data yang dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya. Survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, dll.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Untuk menjaga stabilitas sistem moneter dan keuangan, regulasi moneter menggabungkan langkah-langkah makroprudensial dan moneter. Kebijakan moneter menggunakan kombinasi alat untuk mencapai stabilitas moneter dan sistem keuangan secara bersama-sama, termasuk pendekatan kuantitas dan harga.

**Kata Kunci: Kebijakan moneter, kerangka operasional, makro ekonomi**

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kondisi ekonomi suatu negara secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Proses pertumbuhan kapasitas produksi suatu negara, yang dimanifestasikan sebagai peningkatan pendapatan nasional, adalah cara lain untuk mengonseptualisasikan pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator makroekonomi yang menunjukkan standar hidup warga suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Untuk menentukan posisi ekonomi suatu negara, pertumbuhan ekonomi selalu menjadi fokus utama, bahkan untuk negara berkembang seperti Indonesia. Sulit untuk mencapai tingkat ekonomi yang tinggi namun stabil; faktor makroekonomi harus mampu menyelesaikan setiap masalah yang muncul.

Kebijakan ekonomi makro suatu negara memiliki dampak besar pada standar hidup di negara tersebut. Pemerintah Indonesia dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi makro melalui berbagai cara. Variabel ekonomi di bawah kendali pemerintah yang memiliki potensi untuk mempengaruhi satu atau lebih target ekonomi makro disebut instrumen kebijakan. Pemerintah dapat mengatur perekonomian melalui kebijakan ekonomi makro, seperti memberlakukan kebijakan fiskal dan moneter, dalam rangka meningkatkan komposisi produksi, stabilitas harga, dan perdagangan internasional. Dalam artian, pemerintah perlu menggerakkan dan mendorong kegiatan ekonomi secara umum, pemerintah juga mengeluarkan banyak uang untuk membiayai kegiatan ekonomi.

Tidak mungkin memisahkan transaksi keuangan suatu negara dari aktivitas ekonominya. Jumlah uang beredar adalah bagian dari aliran pembayaran uang. Pergeseran jumlah uang beredar akan berdampak pada ekonomi di sejumlah industri. Ekspansi jumlah uang beredar yang berlebihan berpotensi mendorong harga-harga (inflasi tinggi) lebih tinggi dari yang diantisipasi, yang pada akhirnya dapat menghambat ekspansi ekonomi. Di sisi lain, stagnasi ekonomi akan terjadi jika jumlah uang beredar sangat rendah. Kesejahteraan masyarakat secara umum akan terganggu jika hal ini terus berlanjut. Oleh karena itu, jumlah uang beredar harus dikelola dengan hati-hati setiap saat, dengan mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin terjadi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif, Salah satu ciri khas desain ini adalah bahwa penelitian ini lebih suka menggunakan kata-kata atau gambar daripada angka untuk menunjukkan fakta. Penelitian ini menggunakan metode data sekunder yang merinci objek penelitian dengan sangat rinci dan juga data yang dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya. Survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, dll. penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisis kerangka operasional dan analisis makroekonomi kebijakan moneter di Indonesia secara komprehensif. Dengan memanfaatkan jurnal ilmiah sebagai sumber data utama, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid dan bermanfaat bagi pengembangan kebijakan moneter di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kerangka Operasional Kebijakan Moneter**

Pembuatan program moneter menandai dimulainya fase operasional kontrol moneter. Pada dasarnya, Kebijakan moneter adalah strategi untuk mengelola jumlah uang beredar dengan mempertimbangkan tujuan akhir kebijakan moneter. Menentukan tujuan operasional kebijakan moneter adalah bagian dari program moneter ini. Selain itu, Bank Indonesia memilih tindakan yang diperlukan dan alat yang akan digunakan untuk mempengaruhi tujuan operasional. Saat ini, Bank Indonesia terus menggunakan uang primer sebagai tujuan operasional dalam pelaksanaannya. Alat-alat keuangan berikut ini digunakan untuk mempengaruhi target operasi: Imbuan, Fasilitas Diskonto, Giro Wajib Minimum (GWM), dan Operasi Pasar Terbuka (OPT). Lelang surat berharga digunakan untuk mengeksekusi instrumen OPT, dengan tujuan untuk mengubah likuiditas.

Jumlah uang beredar di masyarakat (M1 dan M2) dapat dimodifikasi agar sesuai dengan tujuan akhir kebijakan moneter, yaitu stabilitas harga, dengan cara mengatur uang primer (M0) sebagai target operasional. Metode berbasis kuantitas mengacu pada penerapan kebijakan moneter melalui penggunaan target moneter (M0, M1, dan M2). Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menerapkan teknik kuantitas. Pertama, Bank Indonesia harus menjaga salah satu indikator yang paling mudah dikontrol, yaitu uang primer, dalam lingkungan dimana sistem keuangan dan ekonomi mengalami banyak perubahan struktural, seperti yang terjadi di Indonesia. Kedua, evolusi jumlah uang beredar, output, dan inflasi semuanya dipengaruhi oleh perkembangan uang primer.

Realisasi telah menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah uang yang beredar, output, dan inflasi dalam jangka pendek tidak selalu stabil - hal ini terjadi baik selama krisis saat ini maupun periode deregulasi keuangan sebelumnya. Sebagai hasilnya, perspektif baru mengenai strategi yang berbeda-pendekatan berbasis harga-yang dianggap lebih konsisten dengan kerangka kerja operasional kebijakan moneter Indonesia telah muncul. Metode ini berfokus pada bagaimana harga moneter, yaitu suku bunga, memainkan peran penting dalam mempengaruhi bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi aktivitas ekonomi. Perkembangan inovasi produk keuangan, proses sekuritisasi, dan aspek-aspek lain dari industri keuangan terkait erat dengan pembentukan cara berpikir baru ini.<sup>1</sup>

#### A. Penguatan Bauran Kebijakan Moneter dan Makroprudensial

Penutup kompleksitas tantangan mengharuskan semua instrumen dalam bauran kebijakan moneter dan makroprudensial ditempuh secara seimbang dan terukur. Dalam kaitan ini, respons bauran kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1. Bank Indonesia akan mengoptimalkan penggunaan instrument makroprudensial bersama dengan kebijakan moneter untuk secara countercyclical menjaga stabilitas moneter dan system keuangan secara keseluruhan.
2. Penggunaan instrumen makroprudensial tersebut lebih bersifat sebagai pendukung (complement) instrument kebijakan moneter dalam rangka mencapai stabilitas makro, bukan sebagai pengganti (substitute).
3. Keberhasilan mencapai tujuan kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial harus diupayakan agar memperkuat suatu sama lain. Pemilihan penggunaan instrument tergantung pada sumber tekanan apakah dari sektor keuangan atau dari sektor riil/moneter.
4. Untuk itu, koordinasi kebijakan sangat diperlukan agar integrasi kebijakan tersebut dalam mengelola siklus dan meningkatkan ketahanan system keuangan secara makro dapat berjalan dengan baik.

Penerapan kombinasi kebijakan makroprudensial dan moneter bekerja bersama untuk menjaga lintasan siklus bisnis dengan tetap mempertimbangkan kapasitas ekonomi. Kebijakan makroprudensial digunakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama dalam menghadapi risiko sistemik, sedangkan kebijakan moneter menggunakan alat seperti instrumen Itv dan penyangga modal countercyclical untuk merefleksikan stabilitas harga dan stabilitas moneter.

---

<sup>1</sup> Perry Warjiyo dan Solikin, Kebijakan Moneter di Indonesia, Jakarta : pusat pendidikan dan studi kebanksentralan, 2003, Hal.46-48

Terkait dengan aspek-aspek di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- Pertama, sebagai instrumen kebijakan moneter yang utama, perubahan suku bunga kebijakan dilakukan dengan merespon tekanan inflasi yang bersifat fundamental, dalam hal ini tercermin pada perkembangan core inflation.
- Kedua, penggunaan instrumen kebijakan moneter dan makropudensial secara bersama-sama bersifat saling melengkapi sehingga dapat digunakan untuk mengelola pengaruh kebijakan dengan baik.
- Ketiga, perlunya bauran instrument yang menyelaraskan peran instrument suku bunga dengan upaya untuk menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan secara terintegrasi. Dalam banyak kasus, penggunaan instrumen suku bunga saja membutuhkan level yang berbeda antara menjaga stabilitas moneter dengan stabilitas system keuangan (grafik kiri). Namun dengan menggunakan bauran kebijakan maka stabilitas moneter dan system keuangan dapat dicapai bersama (grafik kanan).<sup>2</sup>

## **2. Perdebatan Klasik-Keynes dan Pengikutnya Serta Kasus di Negara Lain**

Teori klasik dan keynesian adalah dua teori yang paling terkenal dan banyak diperdebatkan di bidang ekonomi. Kebijakan pemerintah suatu negara juga dipengaruhi oleh perbedaan antara kedua gagasan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa pemerintah harus secara aktif mengelola perekonomian, sementara yang lain berpendapat bahwa perekonomian sebaiknya dibiarkan berjalan dengan sendirinya. Rincian berikut ini menjelaskan bagaimana teori Keynes dan teori-teori klasik berbeda satu sama lain.

### **1. Pandangan Terhadap Ekonomi**

John maynard keynes mengembangkan hipotesis keynes, yang menyatakan bahwa kapitalisme adalah sistem yang baik tetapi kadang-kadang membutuhkan bantuan. Ekonomi yang berkembang mendorong individu untuk bekerja, menghasilkan uang, dan membelanjakannya untuk hal-hal yang mereka inginkan. Perekonomian distimulasi oleh pengeluaran, dan semuanya berjalan dengan baik. Namun, semuanya berubah ketika ekonomi goyah. Banyak pekerja yang dirumahkan, dan bisnis mulai tutup. Banyak orang yang hampir tidak memiliki cukup uang untuk bertahan hidup dengan apa yang tersisa.

---

<sup>2</sup> Juda Agung dkk, Disain Kerangka Kerja Kebijakan Moneter di Indonesia Pasca Krisis : Flexibel Inflation Targeting Framework, Jakarta, 2011, Hal.108-109

Tentu saja, ketika konsumen mengurangi pengeluaran mereka, ekonomi akan kehilangan tenaga dan semakin menurun.

Sebaliknya, teori klasik memprediksi bahwa jika ekonomi diserahkan kepada pasar, ekonomi makro akan berkembang dan tumbuh subur. Hukum Say adalah gagasan yang menyatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaan dengan sendirinya; artinya, pasar akan mampu menyerap barang yang dipasok dalam jumlah atau jenis apa pun.

## 2. Pandangan Tentang Intervensi Pemerintah

Para pendukung teori keynes, yang dikenal sebagai keynesian, berpendapat bahwa intervensi pemerintah sangat penting dan masuk akal. Pemerintah perlu turun tangan dan menerapkan langkah-langkah yang dapat mendorong pengeluaran publik jika individu tidak melakukan pembelian. Pemerintah harus menjalankan defisit anggaran dengan mengurangi pajak atau menaikkan pengeluaran. Pemerintah dapat memulai sejumlah inisiatif, termasuk proyek-proyek infrastruktur. Perkembangan tersebut akan meningkatkan kebutuhan akan lapangan kerja serta jumlah barang dan jasa yang disediakan oleh sektor swasta. Pendapatan konsumen meningkat seiring dengan penurunan pajak. Karena mereka membayar pajak lebih sedikit, orang juga dapat membelanjakan lebih banyak uang untuk produk dan layanan. Keduanya akan mendorong perekonomian dan menyebabkan peningkatan permintaan yang tajam. Peningkatan output didorong oleh prospek permintaan yang lebih baik bagi perusahaan. Oleh karena itu, mereka menuntut pekerjaan yang lebih besar. Perusahaan memesan barang modal untuk meningkatkan kapasitas produksi jika permintaan konsumen tetap stabil. Untuk meningkatkan laba, perusahaan sering kali juga menaikkan harga jual. Sebagai hasilnya, mengurangi pajak atau meningkatkan pengeluaran pemerintah tidak hanya meningkatkan output tetapi juga menurunkan tingkat pengangguran dan secara bertahap meningkatkan inflasi.

Sebaliknya, tujuan teori klasik adalah ekonomi yang bebas dari campur tangan negara. Ide ini, yang berasal dari Bahasa Prancis yang awalnya digunakan oleh para psiokrat untuk melawan campur tangan pemerintah dalam perdagangan pada abad ke-18, dijuluki *laissez faire* oleh Adam Smith, bapak teori klasik.

## 3. Pandangan Pada Pasar Bebas dan Harga

Menurut keynesian, harga seharusnya diatur lebih ketat dalam suatu kisaran, dan pemerintah harus bekerja untuk mempertahankan kisaran tersebut. Mereka ingin pemerintah memberikan tekanan pada individu dan bisnis untuk mempertahankan harga dalam kisaran yang telah ditentukan.

Namun, prinsip teori ekonomi klasik berpandangan bahwa pemerintah dan pihak-pihak lain tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan pasar bebas untuk mengatur dirinya sendiri. Dalam pasar yang bebas dan terbuka di mana semua pesaing diterima, setiap orang bebas untuk mengejar kepentingan mereka sendiri. Seorang karyawan menerima kompensasi untuk pekerjaan mereka, yang kemudian mereka gunakan untuk membeli barang lebih lanjut. Sederhananya, karyawan menghasilkan permintaan mereka sendiri untuk produk dan layanan.

#### 4. Pandangan Terhadap Pengangguran dan Inflasi

Kaum keynesian mendukung intervensi pemerintah dan lebih fokus pada lapangan kerja daripada inflasi. Mereka mengakui nilai yang dapat diberikan oleh pekerja yang memiliki kemampuan ini kepada masyarakat. Harga produk atau daya beli mata uang tidak penting bagi kaum keynesian. Di sisi lain, meskipun para ekonom klasik juga mengkhawatirkan pengangguran, perhatian utama mereka adalah inflasi harga. Menurut mereka, bahaya terbesar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah inflasi. Menurut kebijaksanaan konvensional, ekonomi akan menciptakan lapangan kerja dengan sendirinya tanpa bantuan dari pemerintah. Sebaliknya, mereka percaya bahwa monopoli di beberapa industri atau campur tangan pemerintah di pasar bebas adalah penyebab pengangguran.

#### 5. Pandangan Pada Pertumbuhan Ekonomi Masa Depan

Metode yang digunakan untuk meramalkan dan menangani pertumbuhan ekonomi di masa depan adalah perbedaan utama antara teori Keynes dan teori klasik. Kaum Keynesian berkonsentrasi pada masalah-masalah yang mendesak. Mereka percaya bahwa untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah perlu mengambil tindakan segera untuk menyelesaikan masalah-masalah ini.

Teori klasik berkonsentrasi pada hasil jangka panjang dengan membiarkan pasar bebas menyesuaikan diri dengan masalah jangka pendek. Mereka percaya bahwa masalah jangka pendek hanyalah peristiwa sementara, dan pasar bebas akan menyelesaikannya sendiri pada akhirnya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ajaib, "Perbedaan Pandangan Ekonomi Teori Keynes dan Klasik" (<https://ajaib.co.id/ini-perbedaan-pandangan-ekonomi-teori-keynes-dan-klasik/>, diakses pada 29 maret 2024)



Selain Indonesia, contoh-contoh dari negara lain berikut ini juga berkaitan dengan kerangka kerja operasional kebijakan moneter:

1. Amerika Serikat

- Kasus : Dalam upaya mencegah inflasi yang berlebihan, Bank Sentral AS, atau The Fed, dengan cepat menaikkan suku bunga pada tahun 2022. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan resesi.
- Kerangka Operasional : Kerangka Operasional “penargetan inflasi rata-rata” digunakan oleh The Fed. Dengan kata lain, the Fed menargetkan inflasi jangka panjang rata-rata 2%, tetapi juga mengizinkan inflasi jangka pendek di atas atau di bawah target.
- Dampak : Pasar saham global telah melemah dan dolar AS telah menguat sebagai akibat dari kenaikan suku bunga the Fed.

2. Jepang

- Kasus : Untuk mendorong perekonomian, Bank of Japan (BoJ) telah mempertahankan suku bunga rendah dan mengimplementasikan program pelonggaran kuantitatif (QE) yang besar. Kekhawatiran mengenai keberlanjutan anggaran Jepang telah muncul sebagai akibatnya.
- Kerangka Operasional : Kerangka kerja “kontrol kurva imbal hasil” (YCC) digunakan oleh BoJ. Dengan kata lain, BoJ bertujuan untuk menjaga suku bunga obligasi pemerintah Jepang yang jatuh tempo pada 0%.
- Dampak : Kebijakan BoJ telah menyebabkan yen Jepang melemah dan inflasi meningkat.

3. Inggris

- Kasus : Dalam upaya melawan inflasi, Bank of England (BoE) menaikkan suku bunga, meskipun lebih lambat daripada the Fed. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar upaya BoE untuk mengendalikan inflasi.
- Kerangka Operasioal : BoE memiliki kerangka kerja untuk “penargetan inflasi”. Dengan kata lain, BoE menargetkan inflasi sebesar 2%.
- Dampak : Perekonomian Inggris telah melambat sebagai akibat dari kenaikan suku bunga BoE.

#### 4. Turki

- Kasus : Krisis mata uang dan inflasi yang lebih tinggi disebabkan oleh penurunan suku bunga Bank Sentral Turki (CBRT).
- Kerangka Operasional : Kerangka operasional CBRT tidak jelas.
- Dampak : Turki mengalami penurunan ekonomi yang signifikan sebagai akibat dari krisis mata uang.

### 3. Analisis Makro Ekonomi Kebijakan Moneter

Analisis moneterisme makroekonomi adalah proses menentukan bagaimana variabel makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh moneterisme proses menentukan bagaimana variabel makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh moneterisme. Indonesia telah sudah dibuat melakukan perubahan signifikan terhadap kebijakan moneterinya, sebagaimana dibuktikan dengan amandemen UU No. 23 tentang Bank Indonesia pada tahun 1999 perubahan signifikan terhadap kebijakan moneterinya, sebagaimana dibuktikan dengan amandemen UU No. 23 tentang Bank Indonesia tahun 1999. Fokus kebijakan moneter saat ini adalah menjaga dan meningkatkan nilai rupiah independensi diberikan kepada Bank Indonesia dalam menentukan sasaran inflasi dan arah jumlah uang beredar negara. keputusan pemilihan kebijakan diumumkan oleh Bank Sentral Indonesia tanpa adanya intervensi dari kementerian atau lembaga lain. Secara khususnya, transparansi dan akuntabilitas transparansi dari akuntabilitas nilai tukar mata uang mengharuskan Bank Indonesia untuk mengumumkan tujuan inflasi dan rencana nilai tukar mata uang untuk setiap tahun mata uang nilai tukar mengharuskan Bank Indonesia untuk mengumumkan tujuan inflasi dan rencana nilai tukar mata uang untuk setiap tahun baru mengantisipasi bahwa semua reformasi ini akan mampu mengeluarkan Indonesia dari krisis.

Sesuai dengan dengan UU UU23 Tahun 1999, terlihat jelas bahwa penerapan moneterisme dilakukan melalui penggunaan instrumen moneterisme (pasar uang atau uang agregat) yang menghilangkan saling menguntungkan guna mencapai tujuan akhir stabilisasi harga. 23 Tahun 1999, jelas bahwa penerapan moneterisme dilakukan melalui penggunaan instrumen (pasar uang atau uang agregat) yang mengurangi keuntungan bersama untuk mencapai tujuan akhir yaitu menstabilkan harga. Belakangan ini, moneterisme dikritik pernah karena gagal menemukan paradigma baru mekanisme transmisi yang dianggap mampu menggambarkan “kebijakan variabel”. Dikritik karena gagal menemukan paradigma baru mekanisme transmisi yang dianggap mampu menggambarkan “kebijakan variabel”. Untuk memesan mengetahui kesenjangan transmisi yang disebabkan oleh moneterisme dalam kaitannya dengan perekonomian, sepuluh

penelitian berbeda telah dilakukan di Indonesia untuk menentukan kesenjangan transmisi yang disebabkan oleh moneterisme dalam hal mempengaruhi perekonomian, sepuluh penelitian berbeda telah dilakukan di Indonesia mekanisme transmisi adalah masalah yang paling penting.

Friedman menegaskan bahwa uangkebijakan jumlah kebijakan pasokan mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian, namun Lucas berpendapat bahwa kebijakan yang sama juga akan berdampak buruk terhadap perekonomian jika masyarakat tidak mendukungnya . mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian, namun Lucas berpendapat demikianKebijakan yang sama juga akan berdampak buruk terhadap perekonomian jika masyarakat tidak mendukungnya. Perdebatan - perdebatan mengenai dampak moneterisme terhadap pertumbuhan ekonomi tentang dari studi hubungan antara uang dan output yang dilakukan oleh Friedman dan Schwartz ( 1963 ) . Penelitian ini menggunakan analisis regresi antara uang dan output, serta model yang lebih kompleks seperti Kausalitas Granger dan Vector Autoregression ( VAR) dari Sims (1972) .Dampak moneterisme terhadap pertumbuhan ekonomi dimulai dengan studi tentang hubungan antara uang dan output yang dilakukan oleh Friedman dan Schwartz ( 1963 ) . Penelitian ini menggunakan analisis regresi antara uang dan output, serta model yang lebih kompleks seperti Kausalitas Granger dan Vector Autoregression ( VAR) dari Sims (1972).

## **PENUTUP**

Untuk menjaga stabilitas sistem moneter dan keuangan, regulasi moneter menggabungkan langkah-langkah makroprudensial dan moneter. Kebijakan moneter menggunakan kombinasi alat untuk mencapai stabilitas moneter dan sistem keuangan secara bersama-sama, termasuk pendekatan kuantitas dan harga. Dua teori ekonomi terkenal yang sering diperdebatkan adalah Teori Keynes dan Teori Klasik. Perbedaan utamanya adalah bagaimana pemerintah mengelola ekonomi. Ada kelebihan dan kekurangan dari kedua teori tersebut. Teori klasik lebih cocok untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang, sedangkan teori Keynes lebih cocok untuk mengatasi resesi.

Praktik untuk memeriksa bagaimana kebijakan moneter dapat berdampak pada faktor-faktor ekonomi makro termasuk inflasi, nilai tukar mata uang, dan pertumbuhan ekonomi dikenal sebagai analisis kebijakan moneter ekonomi makro. Kebijakan moneter Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sejak diterbitkannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Seprillina, Linda. 2013. Efektivitas Instrumen Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ilmiah. Vol. 1. No. 1. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Perry Warjiyyo dan Solikin, 2003, Kebijakan Moneter di Indonesia, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
- Juda Agung dkk, 2011, Disain Kerangka Kerja Kebijakan Moneter di Indonesia Pasca Krisis : Flexibel Inflatation Targeting Framework, Jakarta.
- Ajaib, *“Perbedaan Pandangan Ekonomi Teori Keynes dan Klasik”* (<https://ajaib.co.id/ini-perbedaan-pandangan-ekonomi-teori-keynes-dan-klasik/>, diakses pada 29 maret 2024)
- Warjiyo, Perry, F.X. Sugiyono, Suseno, Hotbin Sigalingging, Iskandar, Ascarya, Suarpika Bimantoro, Piter Abdullah, Solikin, 2003, Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan, dan Organisasi, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta.